

**BERITA KONFLIK
DALAM HARIAN AMBON EKSPRES
Studi Tanggung Jawab Media
dalam menciptakan Stabilitas Sosial Politik di Maluku**

Telly Muriany dan A. Alimuddin Unde

Abstract

The aim of this research is to know the factuality, the impartiality and the social impact of Harian Ambon Ekspres in Reporting conflict in Maluku. The analysis units in the research are the conflict report that served in Harian Ambon Ekspres in early 2008 until February 2009 period with types of SARA (clan, religion, race and groups), socio-cultural and politic Conflict Report. The result of the research indicate that, according to the factuality most of the report that served suitable to the facts that happen, this is because of the existence of the official confirmation source from the in service government and security apparatus at the conflict area. Otherwise, according to the impartiality, the unbalance report service is dominant in Harian Ambon Ekspres journalistic practice, this is because of the un-existence of certain party confirmation as the conflict contestant and the cover both sides practice. Factual information presentation without journalistic ethnic limitation and partial report presentation has a negative impact and it is nonsupport in creating social and politic stability in the community around the conflict area.

Keywords: conflict, Mass Responsibility, Stability.

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta, keadaan dan dampak social dari peliputan konflik di Maluku oleh Harian Ambon Ekspres. Unit analisis dalam penelitian ini adalah liputan konflik yang disajikan dalam Harian Ambon Ekspres pada awal 2008 sampai februari 2009 ditinjau dari aspek SARA (suku, Agama, Ras, dan Kelompok), Sosial budaya dan politik. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa menurut dari hasil fakta, sebagian besar dari hasil liputan itu sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Hal ini disebabkan karena sumber informasi yang ada berasal dari petugas pemerintah dan aparaturnya keamanan yang ada di wilayah konflik. Akan tetapi dari sisi lain, ada pihak –pihak tertentu yang berkepentingan dalam peristiwa konflik menilai liputan Harian Ambon Ekspres tidak seimbang terutama dalam cover-both sides. Mereka menilai bahwa informasi yang disajikan kurang dibarengi dengan etika jurnalistik, dan liputan hanya dilakukan sepotong-sepotong sehingga bisa berdampak negatif dan cenderung tidak mendukung terwujudnya stabilitas sosial politik di wilayah konflik.

Kata Kunci: konflik, tanggungjawab Media, stabilitas.

Pendahuluan

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, ketergantungan masyarakat terhadap, media massa untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan semakin besar. Pesan media massa pada hakekatnya merupakan jawaban (*response*) terhadap kebutuhan informasi bagi manusia sebagai

kegiatan komunikasi yang memberinya hak asasi, yakni hak untuk mengetahui (*right to know*). Media massa memberikan manusia akses untuk memperoleh pengetahuan, hiburan dan informasi tentang berbagai kejadian yang bertujuan untuk memperluas cakrawala berpikir. Posisi media di wilayah konflik senantiasa diperhadapkan pada berbagai tantangan yang menmpatkan media

pada posisi dilematis. Di satu sisi tanggungjawab media untuk memberikan realitas apa adanya., namun di sisi lain secara moral media juga bertanggungjawab dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat melalui pemberitaan yang sejuk meskipun jauh dari fakta yang sebenarnya. Media massa dalam konflik Ambon beberapa tahun yang lalu dituduh telah ikut memanaskan konflik dan menjadi corong kelompok agama tertentu, karena media ikut terpecah menjadi segregasi masyarakat. Berita-berita yang dimuat tidak berimbang juga sumber beritanya tidak jelas, tidak ada konfirmasi, dan berjudul berita di-*blow-up* dengan kata-kata emosional. Media tidak hanya berisi informasi tentang kejelekan lawan, tetapi juga telah terjadi perang informasi melalui media.

dalam menciptakan stabilitas sosial di Maluku, maka Ambon Ekspres sebagai salah satu media cetak terbesar di kota Ambon dengan visi “tumbuh bersama dalam kebersamaan” dengan semboynannya “Korannya Orang Maluku”, dan oplah/hari bisa mencapai 6000 ekslembar berpotensi untuk menciptakan perdamaian atau sebaliknya mengorbankan konflik yang mengancam terciptanya stabilitas tersebut. Untuk itu, standar jurnalisme dengan asas *cover both side* menjadi amat penting agar gambaran realitas yang ada di benak khalayak tidak biasa. Di sisi lain, kebenaran menjadi sangat penting karena media mempunyai tanggungjawab moral terhadap kebenaran informasi. Pada ranah demokrasi kebenaran tidak bisa diklaim oleh satu pihak tetapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran pihak lain. ada 3 (tiga) jenis konflik yang mempunyai latar belakang motif masing-

masing dan saling bergantian terjadi di kalangan masyarakat di Maluku, yaitu (1) konflik yang bermotif SARA, dan (2) konflik bermotif sosial budaya, dan (3) konflik yang bermotif politik sehingga mengakibatkan masyarakat kembali hidup dalam suasana yang tidak tenang.

berdasarkan uraian kejadian yang dikemukakan, maka pers seyogyanya menjadi mediator untuk memberikan suasana kondusif terhadap semua jenis konflik yang timbul termasuk konflik di Ambon pada beberapa tahun terakhir.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang diajukan, maka peneliti dapat merumuskan masalah: (1) Bagaimana faktualitas harian Ambon Ekspres dalam pemberitaan konflik guna menciptakan stabilitas sosial politik di Maluku? (2) Bagaimana imparialitas harian Ambon Ekspres dalam pemberitaan konflik guna menciptakan stabilitas sosial politik di Maluku? Dan (3) Bagaimana dampak sosial politik berita konflik dari dalam harian Ambon Ekspres di Maluku?

Kajian Konsep dan Teori

Berita adalah bagian terpenting (produk utama) dari lembaga pers, oleh karena itu sudah barang tentu pemberitaan harus mengikuti kaidah dan norma system pers yang ada. Yang dimaksud dengan pemberitaan mengikuti kaidah dan norma adalah bahwa pemberitaan harus menganut *system cover both side* yakni secara berimbang, jujur, adil dan

bertanggungjawab. Struktur dan penampilan media dengan kriteria-kriteria khusus yang oleh Westerstahl (McQuail, 1994 : 147), dalam objektivitas berita ada dua komponen utama yaitu *factuality* dan *impartiality*, prinsip *factuality* (kefaktualan) menekankan pada *truth* (kebenaran) dan relevansi sedangkan imparsialitas yang dimaksudkan oleh netralitas (*neutrality*), yang dimaksudkan di sini adalah presentasi berita yang disajikan tidak berdasarkan opini wartawan yang menimbulkan maksud tersembunyi (*hidden purposed*), tetapi berdasarkan fakta yang terjadi dengan sentasikan berita yang tidak sensasional. Berita yang seimbang (*balance*), berarti bahwa media hendaklah menyajikan berita, terutama berita konflik yang proporsional (*alequ*) yang memuat prinsip *cover both sides* di mana korban maupun pelaku disampaikan seimbang.

salah satu teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu teori Tanggung Jawab Sosial berusaha memadukan tiga prinsip yang agak berbeda yaitu prinsip kebebasan dan pilihan individual, prinsip kebebasan media, dan prinsip kewajiban media kepada masyarakat. Dapat dikatakan tidak ada cara yang mungkin mampu mengatasi ketidakkonsistenan itu, tetapi teori ini memiliki dua bentuk penanggulangan utama yang lebih disukai. Pertama, pengembangan lembaga publik yang berpengaruh untuk meningkatkan cakupan dan kekuatan politik dari konsep tanggung jawab sosial. Kedua, pengembangan profesionalisme untuk mencapai standar prestasi tinggi yang dapat mempertahankan kemandirian media (McQuail, 1994 : 123-125).

Selanjutnya adalah teori Agenda

Setting. Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw pada tahun 1972 dalam bukunya yang berjudul *The Agenda Function of Massa Media*. Ketika media menyajikan suatu fakta atau peristiwa dengan teknik penonjolan (*salliance*) yang tinggi (menempatkan pada halaman utama sebagai *head line* dan disajikan secara berulang), maka dapat diasumsikan bahwa peristiwa tersebut akan mendapat perhatian yang besar dari khalayak.

Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada berita konflik yang disajikan oleh surat kabar Harian Ambon Ekspres untuk melihat objektivitas media dalam memberitakan konflik di Kota Ambon sebagai implementasi tanggung jawab media dalam menciptakan stabilitas sosial di Maluku. Untuk itu, unit analisis yang digunakan adalah berita konflik dari 3 (tiga) jenis konflik yaitu (1) konflik yang bermotif SARA, DAN (2) konflik bermotif politi yang terbit pada edisi awal tahun 2008 sampai Februari 2009, yang diangkat dalam rapat dewan redaksi sebagai agenda media Ambon Ekspres.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku selama dua bulan, yaitu bulan April sampai Mei 2009. Menggunakan paradigma penelitian “deskriptif Kualitatif”, dimana peneliti berusaha mendeskripsikan data yang diambil dari berita dalam Harian Ambon Ekspres lalu dihubungkan dengan hasil wawancara mendalam terhadap objek penelitian.

Data primer dalam penelitian bersumber dari berita konflik dalam Harian

Ambon Ekspres dan informasi yang diberikan oleh para informan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan data sekunder diperoleh dari buku, majalah, surat kabar serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan informan kunci yakni wartawan Harian Ambon Ekspres yang menduduki posisi sebagai pemimpin redaksi, dan redaktur. Sedangkan informan ahli ketua WPI, tokoh agama, akademis dan pejabat pemerintah.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti menjadi instrumen utama dalam memperoleh data lapangan dengan menggunakan dua macam teknik, yakni: (1) observasi dan (2) wawancara mendalam secara terjadwal terhadap informan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi.

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman (dalam Islami, 2001) yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian

Ada sedikitnya tiga elemen penting yang mempengaruhi objektivitas suatu berita dari media massa, pertama, adalah kekuasaan (*power*). Ketika media berhadapan dengan kuasa otoriter, ia akan cenderung mengikuti apa yang dikehendaki oleh kekuatan yang

sedang berkuasa. Dengan demikian, berita yang disajikan juga harus mengikuti yang diinginkan oleh sang penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kedua, motif bisnis (*business motif*), tatkala media mempunyai keinginan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, maka ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa keuntunganlah yang menjadi tujuan. Ketiga, kebenaran (*truth*), item inilah yang menjadi harapan semua pihak, tetapi kadang kala sulit terwujud.

Selain itu ada banyak kriteria yang disodorkan untuk mengamati objektivitas media massa. Tentu saja dengan kelebihan dan kekurangan yang melekat. Satu diantaranya adalah apa yang pernah disampaikan Westertahl (1993) membagi objektivitas kedalam dua kriteria, yakni faktualitas bisa diwujudkan jika didukung oleh kebenaran dan relevansi (*truth and relevance*). Sementara itu, imparialitas hanya bisa ditegakan jika didukung oleh keseimbangan dan netralitas (*balance and neutrality*).

Dalam sajiannya Harian Ambon Ekspres telah ikut memberikan sumbangsih sebagaimana fungsi media yakni untuk menyampaikan informasi, mendidik, dan menghibur masyarakat Maluku. Namun yang lebih spesifik lagi harian ini berada dalam sorotan penilaian yang beragam yakni (1) media sebagai pemicu konflik, (2) media menutupi konflik, dan (3) media menyelesaikan konflik. (ISAI:2004). Sorotan inilah yang semakin membuat Ambon Ekspres menjadi kokoh dan kuat dalam menghadapi tantangan untuk mengekspresikan segala ide dan gagasan membangun masyarakat.

Berita konflik menjadi sajian menarik bagi kalangan konsumen penikmat media. Namun, berita konflik itu akan menjadi pemicu konflik yang lain seperti stabilitas sosial politik masyarakat yang terganggu tatkala media tidak memperhatikan semua aspek jurnalisme yang ada. Komponen yang berperan untuk menciptakan berita konflik itu menjadi sebuah isu atau kejadian yang penuh informatif atau sebaliknya penuh dengan muatan gejolak terletak di tangan para wartawan (*journalist*), oleh karena itu, profesionalisme wartawan sangat diharapkan mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini.

1) *faktualitas dalam pemberitaan konflik pada harian Ambon Ekspres guna menciptakan stabilitas sosial politik di Maluku.*

Aspek faktualitas dalam kerangka Westertahl merujuk pada suatu bentuk penyajian laporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada sumber dan disajikan tanpa komentar atau paling tidak dipisahkan secara jelas dari komentar. Prinsip faktualitas menekankan pada kebenaran dan relevansi. Penentu faktualitas berupa kriteria kebenaran yang terjadi dilapangan tanpa adanya tendensi dari penulisnya, serta mengutamakan relevansi materi yang disajikan. Faktualitas melibatkan sejumlah aspek antara lain 'kebenaran' yang diukur dengan; kelengkapan, akurasi, dan tidak bermaksud menyesatkan (niat baik).

Aspek lain dari faktualitas adalah 'relevansi'. Aspek relevansi lebih berkaitan dengan proses seleksi dibanding bentuk penyajian dan seleksi itu sendiri dilakukan

menurut prinsip-prinsip yang jelas dan sesuai dengan kepentingan khalayak yang dituju. Sementara aspek "informativeness" adalah menyangkut kualitas isi informasi yang membuat khalayak memperhatikan, memahami, dan mengingat suatu berita.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dimensi kefaktualan berita tercermin melalui faktual waktu, faktual kebaruan, dan faktual masalah yang disajikan dalam pemberitaan Harian Ambon Ekspres tentang berita konflik dimana ketiga unsur kefaktualan berita tersebut semua tercakup di dalamnya. Namun hanya satu yang belum secara aktual dijelaskan yakni faktualitas atas masalah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Di sini masih ditemui kata-kata yang dipakai seperti "*kuat dugaan, atau diduga*" ini sebenarnya merupakan pencampuran opini dan fakta. Kalau memang dugaan seperti itu benar, jika boleh awak media harus meminta konfirmasi kepada orang yang paling berkompeten, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sebenarnya apa yang menjadi objek sengketa sehingga menimbulkan dendam lama.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar berita-berita konflik yang disajikan harian Ambon Ekspres baik konflik bernuansa SARA, maupun konflik bernuansa sosial politik mengedepankan faktualitas pemberitaan ketika menyajikan sebuah fakta atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Faktualitas pemberitaan di Harian Ambon Ekspres tersebut juga didukung pula oleh akurasi berita. Dimuatnya konfirmasi para narasumber seperti Kapolda, dan kesaksian yang diberikan oleh tokoh masyarakat

setempat sangat terlihat dari penyajian berita melalui pertimbangan, konfirmasi kebenaran fakta kepada sumber. Hal ini menandakan bahwa berita ini pada prinsip adalah mencerminkan keaktualan dan kefaktualan berita karena diberitakan dengan mengkonfirmasi sebagian dari narasumber resmi.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan pada beberapa informan menunjukkan bahwa masalah faktualitas merupakan masalah yang sangat prinsipil. Dalam hal peliputan di lapangan wartawan harus benar-benar mengedepankan faktualitas, akurasi bermutu sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang subjektif atau merugikan pihak lain. Prinsip objektivitas harus tetap dipegang teguh sehingga berita-berita yang disajikan oleh Harian Ambon Ekspres tidak menimbulkan konflik baru dalam masyarakat.

Hal ini sejalan pula dengan asumsi dari jurnalisme damai yang berorientasi pada penyelesaian konflik. Media lebih menyoroti prakarsa-prakarsa penyelesaian konflik dan juga mencegah terjadinya lebih banyak konflik. Selain itu media juga berorientasi pada kebenaran atau dengan kata lain media membeberkan ketidakbenaran dari semua sisi. Media dalam memberitakan konflik tidak harus menceritakan kronologis peristiwa secara vulgar. Media lebih mengutamakan menggali informasi penyebab, tujuan, dan penyelesaian konflik dari berbagai pihak.

Dengan demikian berdasarkan analisis terhadap berita konflik yang dilansir oleh Harian Ambon Ekspres dan diperkuat oleh wawancara mendalam dengan berbagai pihak, mulai dari pihak internal maupun

eksternal media, maka dapat dikatakan bahwa harian tersebut telah berupaya menerapkan jurnalisme perdamaian. Hal ini dapat dibuktikan dari diutamakannya prinsip faktualitas dalam berita-berita konflik yang disajikannya.

2). *Imparsialitas dalam pemberitaan konflik pada Harian Ambon Ekspres guna menciptakan stabilitas sosial politik di Maluku.*

Prinsip *impartiality* mengandung hal tentang keseimbangan dan netralitas. Keseimbangan berarti ada *both side coverage* atau pemuatan dua atau lebih gagasan dari tokoh-tokoh yang berbeda, dan nilai imbang atau penilaian dari pendapat yang positif dan negatif. Netralitas media sebagai bagian dari *impartialitas*. Netralitas menyangkut tentang tidak adanya pencampuran opini dan fakta (non evaluative), sesuai judul dengan isi dan tidak mendramatisir (non sensational). Media cetak adalah sebuah fakta sosial yang direkonstruksi dan ditampilkan kembali dalam pemberitaan. Akurasi dalam skema konsep objektivitas pemberitaan Westertahl merupakan salah satu faktor yang menentukan kebenaran (truth), sebagai landasan kerja jurnalisme dimaksudkan menjaga agar wacana fakta media identik dengan fakta sosial.

Ketidakberpihkan (*impartiality*) dalam pemberitaan harian Ambon Ekspres bisa diartikan sebagai parsialitas atau keberpihakan. Ini berarti bahwa ketika seorang wartawan menyampaikan berita kepada pemimpin redaksi sebagai pengambil kebijakan untuk layak dimuat atau tidaknya berita tersebut, maka seharusnya perlu di *recheck* agar tidak terjadi unsur parsialitas di dalam berita yang hendak disampaikan

kepada publik. Selain itu, berita hendaknya dievaluasi sisi positif dan negatif terhadap eksekusi yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terlebih terhadap daerah konflik yang mempunyai kerawanan terhadap stabilitas sosial politik masyarakat setempat.

Dalam beberapa berita yang disampaikan oleh Harian Ambon Ekspres, terdapat begitu banyak berita yang tidak seimbang (*unbalance*), antara lain seperti kasus SARA di Masohi yang diangkat oleh Ambon Ekspres pada edisi 10 Desember 2008 dengan judul “Masohi Rusuh, Puluhan Rumah Dibakar”, cukup banyak menyajikan tentang masyarakat agama tertentu yang melakukan demonstrasi, tetapi dari pihak pelaku sendiri tidak dimuat untuk melakukan konfirmasi ataupun pernyataan lain yang sejenis, sehingga disini berita kelihatan tidak proporsional. Hal ini mungkin muncul karena bisa saja pelaku media cenderung condong kepada prinsip *magnitude* yang mana menyajikan berita yang penuh dengan kontroversial untuk menarik minat pembaca sehingga menaikkan oplah penjualan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Neumann dalam Rahkmat (2003:200) bahwa media massa mempunyai efek yang sangat perkasa untuk mempengaruhi khalayak, maka pemberitaan oleh Harian Ambon Ekspres seperti yang disampaikan di atas memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda dan pemahaman serta tingkat kedewasaan yang tidak memadai terhadap informasi yang membakar emosi massa, sehingga akan menimbulkan reaksi dari

berbagai pihak yang terlibat dalam pertikaian. Dari pihak pelaku muncul semacam penggalangan kekuatan untuk membalas dendam, sementara itu dari pihak korban dengan melihat adanya pernyataan yang menyulut emosi, mereka akan semakin memperkuat kontingen untuk melakukan penyerangan.

Walaupun terhadap hal ini oleh para tokoh masyarakat setempat baik dari praktisi media maupun, tokoh pendidikan, dan tokoh agama setempat yang diwawancarai oleh peneliti mereka memberikan statement bahwa hendaklah media sebagai media masyarakat memeberikan kesejukan kepada masyarakat melalui pemberitaan yang tidak memprovokasi dan tidak menimbulkan emosi massa, namun sebaliknya media juga berpegang pada prinsip kebijakan media yang ingin menyampaikan informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat (*right to know*), sehingga berita yang vulgar pun tetap terlihat.

Berkaitan dengan imparsialitas harian Ambon Ekspres menyangkut pemberitaannya seputar konflik yang terjadi, beberapa informan mempunyai pendapat dan komentar yang hampir senada. Mereka mengatakan bahwa Ambon ekspres sebagai sebuah media besar yang punya jaringan secara nasional maka, Ambon Ekspres selalun menghasilkan berita-berita yang dianggap layak bagi masyarakat apalagi menyangkut berita konflik dengan berbagai pertimbangan, termasuk didalamnya *cover both sides* yang menyajikan berita dengan cara selalu memberikan porsi yang sama pada kedua pihak yang berkonflik sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negative terhadap konflik maupun Ambon Ekspres

itu sendiri. Begitu juga dengan prinsip netralitas dan peliputan *cover both sides*, Ambon Ekspres hendaknya bisa menjadi mediator dalam penyelesaian konflik dengan berita-berita yang bisa meredam konflik atau bisa membantu penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang bertikai.

3) *Dampak social politik berita konflik dalam harian Ambon Ekspres di Maluku*

Selain dimensi faktualitas dan imparialitas di atas, penulis juga menemukan dimensi dampak social politik dari berita-berita konflik yang dimuat oleh harian Ambon Ekspres. Berbicara tentang dampak social politik dalam kaitan dengan penelitian ini ada dua situasi yang bisa dilihat. *Pertama*, politik media. Media mempunyai strategi untuk tetap menyajikan berita konflik sebagaimana adanya, agar melanggengkan keberadaan konflik tersebut sehingga tujuan bisnis media bisa tercapai dengan baik.

Sebagai suatu ilustrasi bahwa media jarang menerapkan jurnalisme damai bagi kelompok masyarakat yang sedang bertikai sebagai mana digambarkan dalam salah satu berita harian Amnon Ekspres yang memberitakan secara vulgar perkelahian kedua kelompok warga (pelauw dan kailolo) yang terjadi di depan Ambon Plaza. Penyajian yang demikian menggambarkan bahwa, media tidak mempunyai kemauan baik untuk menunjukkan bentuk penyajian yang menyejukkan. Hal ini tidak terlepas dari politik media untuk tetap mempertahankan keadaan seperti ini sehingga pelaku bisa menaikkan oplah penjualan demi mendapatkan yang besar dari kerusuhan konflik yang ada. Implikasi dari kenyataan ini adalah banyaknya konflik yang menjadi konsumsi media untuk

disebarluaskan kepada masyarakat. Penyebarluasan berita ilmiah ini yang menjadi komoditi para elit politik untuk memanfaatkan media sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan lawan politik yang sedang berkuasa apalagi jika media itu tidak professional.

Pembahasan

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kadang kala para praktisi dan pemilik media memihak penguasa tertentu untuk menciptakan situasi yang tidak aman didaerah untuk dijadikan alasan sebagai bahan propaganda politik kepada masyarakat constituent dan kelompok lainnya, maka yang menjadi korban dan kambing hitam adalah masyarakat bawah yang tidak tahu persis duduk persoalan.

Apabila media memegang teguh jurnalisme dama, maka pernyataan yang bernilai politis dari salah satu pihak tertentu harus dimuat secara berimbang dengan meminta konfirmasi dari pihak lain yang juga berkompeten. Selain itu, media juga harus jeli dalam memuat pernyataan-pernyataan, tersebut dengan memperhatikan dampaknya bagi masyarakat. Media yang menganut *peace journalism*, hendaknya tidak memuat sesuatu yang bertujuan untuk semakin memanas-manasi kelompok yang berkonflik sehingga memperluas pertikaian yang terjadi. Seiring dengan terjadinya konflik yang tidak pernah berkesudahan di Maluku, maka disinilah media bisa memainkan perannya dalam memberikan kesejukan melalui pemberitaannya seputar konflik bukan sebagai penyulut atau pembakar emosi dari pihak yang bertikai dan membuat

konflik semakin panas dan berkepanjangan. Selain itu pers berfungsi memberikan pendidikan, hiburan dan melakukan control social. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila pers diberikan kebebasan. Namun karena kebebasan sifatnya tidak absolute, dengan sendirinya kebebasan pers memiliki keterbatasan pada tatanan hukum, etika dan moral (Sidney Hook dalam Cangara, 2009). Atas dasar itu, orang mempertanyakan bagaimana mestinya tanggung jawab pers dalam menjaga kebebasannya itu (*responsibility to keeps its freedom*) Karen melakukan sesuatu dalam keadaan bebas tanpa tanggung jawab akan cenderung menimbulkan perbuatan salah. Untuk itu kebebasan dilihat dari sisi dimensi “ bebas dari “ dan dimensi “ bebas untuk “. Dimensi bebas diartikan bahwa pers harus bebas “dari” segala bentuk paksaan dan intervensi dari luar institusi manapun. Ia harus berperan untuk bisa menjaga dan memelihara perkembangan masyarakat. Sedangkan dari dimensi bebas “untuk” berarti pers harus bertanggungjawab kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak warga Negara dan menaati aturan-aturan yang ada dalam masyarakat.

Lebih jelas lagi kalau berita konflik tersebut ditinjau dari dimensi komunikasi maka akan jelas dalam prakteknya bahwa penyampaian informasi oleh media kepada khalayak merukan fenomena komunikasi, lebih khusus adalah komunikasi massa yang bersifat satu arah. Oleh karena sifatnya yang satu arah, maka informasi apapun akan mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak. Berita konflik yang disampaikan dalam harian Ambon Ekspres menggunakan teknik

persuasi *fear appel and emotional appeal*, dimana menurut Cangara (2007 : 117) bahwa penyusunan dan penyampaian informasi teknik *fear appeal* menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak, sementara itu penyampaian secara *emotional appeal* dengan maksud untuk mengugah emosional khalayak.

Dalam teknik terakhir ini sangat jelas akan memperlihatkan kecenderungan sang wartawan untuk memihak salah satu kelompok yang bertikai. Judul yang disampaikan juga membuat orang cemas dan takut “*Dua Terluka, 13 Rumah Terbakar Terkait Masalah tanah, Warga Air Salobar Terlibat Bentrok*”. Seharusnya sesuai dengan pendapat Keraf diatas, maka amanat dari judul juga hendaknya ikut menyejukkan hati, bukan sebaliknya kerena berita konflik maka tema juga memakai kata-kata yang vulgar, sehingga menimbulkan rasa cemas di masyarakat yang tidak mengetahui duduk persoalan secara jelas.

Selanjutnya terkait dengan media sebagai sarana public yang diberi kewenangan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi, hiburan dan pendidikan juga penyampaian isi informasinya tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian agenda yang diangkat oleh media akan menjadi pembicaraan dimasyarakat. Tak kala isi agenda media berkaitan dengan konflik maka masyarakat sebagai konsumen media juga ikut memberikan makna kepada konflik yang diangkat kemudia dirujuk dengan realita sebernarnya terjadi.

Bila zona kejadian tidak berjauhan diaman masyarakat tersebut berada,maka mereka akan ikut untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Apa yang dikatakan teori agenda

setting bila dielaborasi oleh media kemudian di *follow-up* oleh masyarakat, sehingga menjadi agenda pembicaraan yang hangat diantara mereka. Dalam penelitian ini ditemukan adanya peristiwa yang terjadi dalam masyarakat diangkat oleh media untuk diberitakan kembali kepada public dalam frekuensi yang berulang-ulang dan disajikan dalam edisi yang berturut-turut, dengan demikian menyebabkan pemaknaan atas isi berita dengan interpretasi yang beragam sehingga terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, sifat sensor diri (*self sensor*) yang dianut pers seyogyanya dipraktekkan secara benar, sehingga masyarakat (khalayak) tidak salah kaprah, dan media pun tidak dijadikan sebagai objek yang dimusuhi masyarakat. Sensor diri dalam hal ini berkaitan dengan pemberitaan yang seimbang antara kelompok yang bertikai, berita yang factual dengan melakukan *check and recheck* dilapangan dan konfirmasi narasumber.

Kunci utama penyajian berita yang berimbang dalam hal ini mencakup imparialitas dan faktualitas suatu media terletak pada wartawan sebagai ujung tombak pencari berita. Oleh karena itu, unsur *self sensor* yang melekat pada diri wartawan harus didayagunakan. Sikap yang netral, memberdayakan diri secara profesional sehingga tidak ikut terpancing oleh rasa solidaritas dan kolektivitas terhadap kelompok yang senasib dan sepenanggungan menjadi penting dalam hal pencarian, peliputan dan produksi berita, terlebih berita itu menyangkut dua kelompok yang saling bertikai.

Konflik dimana pun berada, bagaimanapun bentuknya dan apapun motif yang

melatarbelakanginya adalah merupakan atraksi kekerasan yang dipertunjukkan oleh kelompok masyarakat yang terlibat pertikaian. Sikap emosional akan memuncak, dengan demikian rasa solidaritas pun akan muncul untuk mempererat rasa kolektivitas tatkala kerusuhan melibatkan kelompok, tidak bisa dihindari bahwa pemicu apapun termasuk pemberitaan media yang memprovokasi bisa mendai persoalan terlepas dari besar dan kecilnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktualitas (*factuality*) dijabarkan lebih lanjut kedalam dua item yakni kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*) untuk menjadi satu jiwa dari suatu berita. Penyajian berita konflik oleh Harian Ambon Ekspres ditinjau dari dimensi faktualitas (*factuality*), hamper keseluruhan/ sebagian besar berita yang disajikan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya konfirmasi dari narasumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik maupun narasumber resmi dari pemerintah dan para petinggi aparat berwajib setempat.
2. Jika dilihat dari dimensi imparialitas (*impariality*) dapat disimpulkan bahwa berita konflik yang disajikan oleh Harian Ambon Ekspres, terdapat sebagian besar berita yang

disampaikan secara tidak seimbang (*un-bal-ance*) dan tidak menerapkan prinsip *cover both sides*, keseimbangan dalam pemberitaan menciptakan ketidakberpihakan (imparsialitas) dan ketidakseimbangan melahirkan keberpihakan. Dengan demikian, pada kondisi sebaliknya ketidakberpihakan dalam pemberitaan akan menjaga keseimbangan pemberitaan dan keberpihakan membuat ketidakseimbangan pemberitaan.

3. Dampak social politik berita konflik dalam pemberitaan pada Harian Ambon Ekspres adalah dampak berita yang tidak menimbulkan akses konflik dan masalah baru setelah informasi tersebut telah disebar dan dibaca oleh masyarakat., tetapi sebaliknya memberkan kesejukan suasana dalam masyarakat itu sendiri. Berita konflik menjadi sajian menarik bagi semua kalangan konsumen penikamat media. Namun, berita konflik itu akan menjadi pemicu konflik yang lain seperti stabilitas social politik masyarakat yang terganggu tatkala media tidak memperhatikan semua aspek jurnalisme yang ada.

Daftar Rujukan

- Cangara, Hafied, 2005, Kebebasan dan Tanggung Jawab Media Massa Indonesia di Tengah Reformasi dan Ancaman Diistegrasi Bangsa, Pidato Pengukuhan Guru Besar, tidak diterbitkan,
- 2007, Pegantar Ilmu Komunikasi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- 2009, Komunikasi Politik : kon-sep, teori, dan strategi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ISAI, 2004, Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan Rekonsiliasi Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Hasil Laporan Kajian Tematis Oleh Institut Study Arus Informasi (ISAI) dengan pendampingan teknis dari Internasional Media Support (IMS) Denmark. Isai, Jakarta.
- Islami, M,Irfan, 2001, filsafat Ilmu dan Metodolog, penelitian, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Kovach, Bill dan Rosenstiel, Tom, 2004, Elemen-Eleman Jurnalisme; apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik. Terjemahan oleh Yusi A. Peraanom dan Editor oleh Stanley, Jakarta.
- Masduki, 2005, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, UI-Press : Yogyakarta.